

RELOKASI DARI DESA LAMA KE ECOVILLAGE DEMI KESEJAHTERAAN BERKELANJUTAN MASYARAKAT KAWASI

Relocation From the Old Village to Ecovillage for the Sustainable Welfare of Kawasi Community

Sarina La Opi¹
Sahrony A. Hirto^{1*}
Muhamad Jani¹

¹Universitas Muhammadiyah
Maluku Utara, Ternate

*corresponding author:
sahrony1987@gmail.com

Abstrak

Ekspansi industri pertambangan nikel di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, memicu perencanaan relokasi masyarakat ke kawasan "Ecovillage". Proses ini tidak hanya melibatkan perpindahan fisik, namun juga implikasi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Penelitian ini menganalisis efektivitas perencanaan relokasi dalam mengatasi persoalan sosial-ekonomi dan menjamin kesejahteraan masa depan masyarakat, menggunakan kerangka perencanaan transformatif Friedman yang menekankan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama. Dengan pendekatan fenomenologi kualitatif melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan, studi ini mengidentifikasi beberapa isu krusial: minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, serta implementasi program yang tidak optimal, misalnya pasar dan sentra pertanian belum berfungsi, serta akses jalan tani yang belum terealisasi. Rekomendasi utama meliputi peningkatan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, peningkatan transparansi, sosialisasi komprehensif, dan adaptasi terhadap pola kebiasaan lokal. Tujuannya adalah memastikan relokasi tidak hanya menjadi solusi spasial, tetapi juga katalisator kesejahteraan berkelanjutan.

Kata Kunci:

Relokasi
Kawasi
Ecovillage
Partisipasi
Pertambangan

Keywords:

Relocation
Kawasi
Ecovillage
Participation
Mining

Abstract

The expansion of the nickel mining industry in Kawasi Village, Obi District, South Halmahera Regency, has triggered a relocation plan for the community to an "Ecovillage" area. This process involves not only physical displacement but also complex social, economic, and cultural implications. This study analyzes the effectiveness of the relocation planning in addressing socio-economic issues and ensuring the future welfare of the community, utilizing Friedmann's transformative planning framework, which emphasizes community participation as a key actor. Employing a qualitative phenomenological approach through in-depth interviews, document analysis, and field observations, this study identifies several critical issues: minimal community participation, lack of transparency in decision-making processes, and suboptimal implementation of programs, e.g. markets and agricultural centers are non-functional, and farm access roads remain unrealized. Key recommendations include enhancing community involvement at every planning stage, increasing transparency, comprehensive socialization, and adapting to local customs and habits. The aim is to ensure that relocation serves not merely as a spatial solution but as a catalyst for sustainable community welfare.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index>

Submit: 09-11-2025

Accepted: 20-11-2025

Published: 25-11-2025

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dan kebutuhan akan sumber daya alam telah mendorong ekspansi industri ekstraktif secara masif di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan dengan kekayaan mineral melimpah, Indonesia kini memegang posisi strategis dalam rantai pasok global, khususnya untuk komoditas nikel. Data terbaru menunjukkan

bahwa Indonesia mendominasi produksi nikel dunia, dengan kontribusi mencapai 48,48% dari total produksi global pada tahun 2022, setara dengan 1,6 juta metrik ton (Databooks, 2023). Capaian ini secara signifikan menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dan magnet investasi dalam pengelolaan sumber daya nikel, terutama dalam konteks transisi energi global menuju

kendaraan listrik, di mana nikel menjadi komponen esensial baterai.

Provinsi Maluku Utara, yang dikenal kaya akan sumber daya alam mulai dari sektor pertambangan, perikanan, hingga pertanian, menjadi salah satu wilayah prioritas bagi pengembangan industri nikel. Cadangan nikel yang besar di provinsi ini menarik perhatian investor dan pelaku industri global (Handayani et al., 2021). Pulau Obi, khususnya Desa Kawasi di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, telah bertransformasi menjadi pusat vital aktivitas pertambangan nikel. Perhatian dunia tertuju pada Desa Kawasi dengan beroperasinya pabrik nikel sulfat terbesar di dunia, yang memiliki kapasitas produksi hingga 240 ribu ton per tahun. Pabrik megah ini, yang diresmikan pada 31 Mei 2023 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, merupakan bagian dari konsorsium PT Harita Nickel, di bawah naungan Harita Group (CNBC Indonesia, 2023)(Kumparan, 2023). Kehadiran industri berskala global ini secara otomatis menempatkan Desa Kawasi sebagai episentrum ekonomi baru, yang diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan regional.

Penetapan Kawasan Industri Obi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 semakin mempertegas komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan di wilayah ini. PSN ini secara eksplisit dirancang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator makro-ekonomi menunjukkan dampak positif yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27,74% pada kuartal II tahun 2022, sebuah angka yang mengesankan dan menempatkannya sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tidak hanya di Indonesia, tetapi bahkan di kancah global (CNN, 2022). Data ini seringkali dijadikan justifikasi kuat atas narasi pembangunan yang dibawa oleh sektor ekstraktif.

Namun, di balik narasi kemajuan ekonomi dan pencapaian pembangunan yang gemilang, terdapat realitas yang lebih kompleks dan banyak kontradiktif. Ekspansi industri pertambangan nikel juga membawa konsekuensi lingkungan dan sosial yang serius, mengancam keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat lokal. Mongabay (2023), kerusakan lingkungan di sekitar Desa Kawasi, di mana Sungai Loji dan Air Cermin, yang dulunya menjadi sumber air bersih masyarakat, kini keruh akibat sedimentasi bijih nikel, menjadikannya tidak layak konsumsi. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga memengaruhi kesehatan dan tradisi masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam.

Lebih jauh, kehadiran industri pertambangan telah mengubah struktur sosial-ekonomi masyarakat secara fundamental. Masyarakat Pulau Obi, yang secara turun-temurun menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan, kini berbondong-bondong beralih profesi menjadi buruh tambang. Pergeseran mata pencarian ini, meskipun menawarkan stabilitas pendapatan jangka pendek, menimbulkan berbagai persoalan jangka panjang, termasuk minimnya pengembangan sumber daya manusia terdidik di luar sektor tambang, infrastruktur dasar yang tidak memadai, serta terabaikannya layanan kesehatan yang krusial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Desakan ekspansi industri juga telah menekan ruang gerak masyarakat, di mana area permukiman dan bahkan fasilitas pendidikan mengalami gangguan signifikan akibat kebisingan dan aktivitas operasional tambang yang berjarak sangat dekat. Sebagai contoh, sekolah yang seharusnya menjadi tempat kondusif untuk belajar, justru terpapar polusi suara dan debu, mengganggu proses pendidikan (Masiha, 2021). Tidak hanya itu, pemindahan akses pelabuhan juga menjadi kendala serius, karena masyarakat kini terpaksa melewati jalur operasional alat berat untuk mengakses fasilitas vital tersebut, meningkatkan risiko keselamatan.



Gambar 1. Perbatasan Sekolah dan Perusahaan
Sumber: Hasil Pemotretan Tahun 2024

Menyikapi berbagai tekanan dan dampak negatif tersebut, pihak perusahaan bersama pemerintah desa mengajukan solusi berupa relokasi masyarakat Desa Kawasi ke sebuah kawasan baru yang didesain sebagai "Ecovillage". Konsep *Ecovillage* secara ideal menawarkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, harmonis dengan alam, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Gartika & Diana, 2020; Singkawijaya et al., 2019). Namun, rencana relokasi ini justru memicu gelombang penolakan signifikan dari sebagian besar masyarakat. Mereka merasa bahwa hak-hak mereka dirugikan, dan proses pengambilan keputusan tidak melibatkan partisipasi yang memadai. Pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara visi pembangunan yang diusung oleh pemerintah dan perusahaan dengan aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat lokal.

Relokasi masyarakat, terutama dalam konteks konflik lahan dan sumber daya alam, merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa relokasi seringkali gagal memenuhi janji kesejahteraan jika tidak direncanakan dan dilaksanakan secara partisipatif, transparan, serta berdasarkan pada pemahaman mendalam tentang dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terdampak (Sutantio et al., 2021; Friedmann, 2020). Pendekatan perencanaan transformatif Friedman (2021), yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan, menjadi relevan untuk menganalisis kasus ini. Friedman berargumen bahwa perencanaan yang efektif harus memberdayakan

masyarakat, bukan sekadar memindahkan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengevaluasi apakah perencanaan relokasi masyarakat Desa Kawasi ke kawasan *Ecovillage* ini benar-benar mampu menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi yang ada dan menjamin kesejahteraan masyarakat di masa depan, ataukah hanya akan menciptakan persoalan baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas perencanaan relokasi Desa Kawasi. Fokus utama adalah untuk mengetahui sejauh mana perencanaan tersebut dapat mengatasi persoalan sosial-ekonomi yang timbul akibat ekspansi pertambangan, serta memastikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat di *Ecovillage*. Melalui studi fenomenologi kualitatif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mendalam tentang dinamika relokasi, mengidentifikasi kelemahan dalam proses perencanaan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan dan keadilan sosial bagi masyarakat Desa Kawasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam pengalaman hidup serta persepsi masyarakat Desa Kawasi dan berbagai pemangku kepentingan terkait proses relokasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa kompleks dari dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang timbul akibat perpindahan dan perubahan lingkungan hidup (Creswell, W. John & Creswell, 2018; Nasution, 2023). Melalui narasi deskriptif yang komprehensif, penelitian ini berupaya mengungkapkan makna-makna subjektif yang dilekatkan pada fenomena relokasi, partisipasi masyarakat, serta efektivitas implementasi program di kawasan *Ecovillage*.

Lokasi penelitian berpusat di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku

Utara, yang dipilih karena menjadi sentra aktivitas pertambangan nikel dengan dampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal dan menjadi lokasi implementasi program relokasi. Pengumpulan data primer dilaksanakan secara intensif selama periode Agustus hingga September 2024, memungkinkan peneliti untuk mengobservasi dinamika terkini dan respons masyarakat pasca-implementasi awal program.

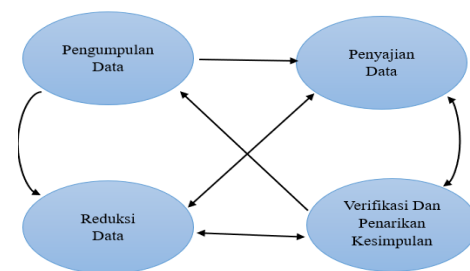
Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci yang dipilih secara purposif untuk mewakili berbagai perspektif. Informan tersebut meliputi masyarakat Desa Kawasi (baik yang telah pindah maupun yang menolak relokasi), termasuk tokoh agama dan perwakilan nelayan, untuk menangkap pengalaman langsung mereka. Selain itu, wawancara dilakukan dengan perangkat Desa Kawasi (Kepala Desa dan Sekretaris Desa), serta perwakilan Pemerintah Daerah terkait seperti Camat Kecamatan Obi, Anggota Dewan, perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM), dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda Halmahera Selatan) guna memperoleh informasi mengenai kebijakan, perencanaan makro, dan koordinasi antarlembaga. *Staf Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Harita Nickel juga diwawancarai sebagai representasi pihak industri yang terlibat dalam relokasi dan program pemberdayaan.

Untuk melengkapi wawancara, observasi lapangan langsung dilakukan di desa lama, kawasan *Ecovillage*, fasilitas publik, dan sentra pertanian, disertai dokumentasi visual melalui fotografi. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terkait perencanaan relokasi, dampak pertambangan, dan konsep *Ecovillage*. Selain itu, dokumen kebijakan pemerintah, seperti Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun

2023, serta pemberitaan media massa yang kredibel, turut dijadikan sumber data sekunder untuk memperkaya konteks dan analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles et al. (2014), yang melibatkan serangkaian alur kegiatan yang saling terkait dan berlangsung secara simultan. Tahapan dimulai dengan kondensasi data, di mana data mentah dari lapangan diseleksi, difokuskan, disederhanakan, dan ditransformasikan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang terorganisir untuk memfasilitasi pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), di mana peneliti menginterpretasikan makna, membangun pola, dan mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data.

Gambar 2. Teknik Analisis Data Interaktif



Sumber: Miles et al. (2014)

Proses analisis ini bersifat iteratif, memungkinkan peneliti untuk secara terus-menerus bergerak bolak-balik antara pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

HASIL

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kawasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kawasi pada masa sebelum kehadiran industri tambang merupakan kawasan pesisir yang dikelilingi hutan lebat, dengan keanekaragaman hayati tinggi dan perkebunan produktif masyarakat, seperti cengkeh, pala, kelapa, dan kakao. Mata pencaharian utama masyarakat adalah melaut dan berkebun, serta kehidupan sosial terbentuk secara

harmonis antara dua kelompok etnis, yakni Tobelo dan Galela. Tradisi saling membantu dan solidaritas sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, sejak ekspansi pertambangan nikel dan pembukaan lahan skala besar, kondisi ekologis dan sosial berubah drastis. Gambar 3 memperlihatkan perubahan bukaan lahan dari 2011–2023 yang menunjukkan tingkat deforestasi signifikan sebagai konsekuensi aktivitas industri. Dampak ekologis terlihat pada menurunnya kualitas udara, hilangnya pohon sagu, turunnya populasi ikan, serta degradasi sumber air bersih.



Gambar 3. Pembukaan Lahan 2011 – 2023 (JATAM, 2023)

Wawancara dengan Abadan sebagai tokoh agama, menggambarkan perubahan lingkungan dan sosial tersebut:

“...Dulu masyarakat hidup damai tanpa suara pabrik, sagu sangat melimpah, air tidak tercemar, ikan melimpah, dan masyarakat bertani serta melaut. Setelah perusahaan masuk, keadaan berbanding terbalik bahkan berdampak pada relokasi desa...” (24-08-2024).

Pandangan serupa disampaikan Nasir Joronga, yang menegaskan hilangnya ketenangan dan sumber daya alam, serta keresahan terkait rencana pemindahan pemukiman yang menjauh dari laut sehingga mengancam keberlanjutan profesi nelayan. Lokasi *ecovillage* berjarak sekitar satu kilometer dari bibir pantai, berbeda dengan desa asal yang berada tepat di tepi laut.

“Dulu sebelum masuknya industri tambang masyarakat damai semua dapat di peroleh dengan mudah...” (24-08-2024).

Informan lain, Ibu lin, memberikan perspektif berbeda dengan menekankan adanya dampak positif berupa

tersedianya lapangan kerja baru di sektor tambang yang memungkinkan keluarganya memperoleh pendapatan tetap. Meskipun demikian, ia tetap mengakui adanya kerusakan ekologis dan perubahan lanskap kehidupan masyarakat.

“... dampak positif dari kehadiran perusahaan seperti perusahaan membuka peluang kerja untuk masyarakat lingkaran tambang...” (25-08-2024).

Implementasi Relokasi ke Kawasan *Ecovillage*

Menurut penjelasan Sekretaris Desa Kawasi, Frans Datang, *ecovillage* merupakan kawasan yang disiapkan perusahaan untuk menampung masyarakat yang direlokasi. Sebanyak 216 KK telah pindah, sementara 116 KK masih bertahan di desa lama karena berbagai alasan, termasuk keterikatan terhadap tanah adat dan kekhawatiran kehilangan hak terhadap rumah yang dibangun di atas tanah milik perusahaan.

“*Ecovillage* adalah salah satu kawasan yang disediakan oleh perusahaan untuk tempat relokasi masyarakat Desa Kawasi yang baru...” (24-08-2024).

Penolakan terhadap relokasi digarisbawahi oleh Abadan, yang menyatakan bahwa kepastian kepemilikan tanah dan kekhawatiran terhadap potensi pengusiran di masa depan menjadi alasan utama enggan pindah. Tanah dianggap bukan sekadar aset ekonomi, melainkan simbol identitas dan warisan leluhur.

“...saya tidak mau pindah karena saya khawatir ketika sudah pindah suatu saat nanti akan di usir oleh pihak perusahaan...” (24-08-2024).

Ketersediaan fasilitas di *ecovillage* menjadi fokus lain dalam hasil penelitian. Pihak kecamatan dan perusahaan telah menyediakan infrastruktur dasar seperti listrik gratis, air, pelabuhan, ruko, pasar, sekolah, puskesmas, dan fasilitas keagamaan. Namun, berdasarkan pengakuan Ibu Hisna Nasir, pasar di *ecovillage* belum berfungsi optimal sehingga sebagian besar kebutuhan harian tetap diperoleh dari pasar lama.

“...Namun, untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari saya dan masyarakat lainnya masih berbelanja di desa lama karena pasar di *Ecovillage* belum di

tempatkan dan pasar sementara tidak di fungsikan...” (25-08-2024).

Observasi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pasar dan ruko belum selesai, dan pasar sementara yang disediakan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena kurang strategis dan tidak memenuhi pola interaksi ekonomi yang telah terbentuk sejak lama. Hal tersebut ditampilkan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 4. Kondisi Pasar Sementara dan Ruko yang Belum Selesai Dibangun
Sumber: Pemotretan langsung dilapangan 2024

Infrastruktur Penunjang dan Program Pemberdayaan

Wawancara dengan anggota DPRD Kecamatan Obi, Fahrul Jamaludin (12 Agustus 2024), menegaskan bahwa relokasi bertujuan mengurangi risiko paparan polusi industri serta menyiapkan lingkungan sosial ekonomi baru yang lebih sehat, lengkap dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“...terkait relokasi bertujuan agar masyarakat terhindar dari polusi karena dekat dengan industri dan relokasi sudah mempertimbangkan persoalan sosial ekonominya...” (12-08-2024).

Pandangan serupa juga muncul dari siswa SMA, Jefri Rafik, yang menilai fasilitas pendidikan di sekolah baru jauh lebih baik dan kondusif. Kelas ber-AC dan tersedianya bus antar-jemput meningkatkan kenyamanan belajar.

“Suasana belajar di sekolah baru lebih nyaman di bandingkan dengan sekolah sebelumnya...” (04-09-2024).

Selain itu, pemerintah desa mengajukan beberapa permintaan kepada perusahaan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat pasca-relokasi:

- a. Tunjangan bulanan untuk keluarga terdampak.
- b. Penetapan kepemilikan rumah atas nama setiap KK.

- c. Pembangunan jalan tani menuju kawasan pertanian produktif di kilometer 14 (belakang Danau Karo).

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa rencana pembangunan jalan tani belum terealisasi meskipun kawasan tersebut memiliki potensi pertanian yang tinggi, sebagaimana terlihat pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Lokasi Sekitar Danau Karo
Sumber: Google Maps

Sementara itu, program pemberdayaan masyarakat melalui Sentra Pertanian Salam Kawasi yang dikelola CSR perusahaan bertujuan melatih warga dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Namun, implementasinya belum optimal akibat minimnya sosialisasi dan pendampingan, sehingga lebih sering dimanfaatkan sebagai lokasi rekreasi dibanding pusat pelatihan.

Proses Perencanaan Relokasi dan Minimnya Keterlibatan Masyarakat

Relokasi Desa Kawasi menghadapi persoalan serius terkait transparansi dan partisipasi publik. Wawancara dengan beberapa masyarakat menegaskan bahwa musyawarah dianggap tidak dilakukan secara inklusif dan informasi mengenai relokasi datang secara tiba-tiba. Hal ini bertentangan dengan klaim pemerintah desa yang menyatakan telah mengadakan tiga kali musyawarah.

“Tidak pernah adanya musyawarah terkait relokasi dengan masyarakat kecil. Tiba-tiba bangunan sudah ada...” (24-08-2024).

Selain itu, proses pengumpulan data terkait kebijakan relokasi menghadapi hambatan karena beberapa pejabat daerah dan pihak CSR tidak bersedia diwawancarai,

serta saling melempar tanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dan lemahnya koordinasi antar-instansi.

PEMBAHASAN

Relokasi masyarakat Desa Kawasi ke kawasan *Ecovillage* merupakan contoh kompleks dari interaksi antara kepentingan industri, kebijakan pemerintah, dan hak-hak masyarakat lokal. Transformasi sosial ekologis yang terjadi tidak hanya mencerminkan perubahan fisik ruang dan lingkungan, tetapi juga perubahan mendalam dalam struktur sosial, kultur, dan relasi kuasa yang mengatur kehidupan masyarakat.

Pembahasan ini menguraikan secara kritis lima aspek utama yang ditemukan dalam penelitian, yaitu: (1) perubahan sosial-ekologis akibat pertambangan, (2) problem relokasi dan keterikatan terhadap tanah adat, (3) kelemahan perencanaan fasilitas ekonomi di kawasan baru, (4) tertutupnya informasi dan lemahnya tata kelola, serta (5) ketidakefektifan program pemberdayaan CSR. Seluruh aspek ini diintegrasikan dengan kerangka teori perencanaan dan administrasi pembangunan untuk membaca lebih jauh implikasi kebijakan relokasi di Desa Kawasi.

Transformasi Sosial Ekologis

Pertumbuhan industri ekstraktif di Desa Kawasi menciptakan suatu proses yang dalam studi sosial lingkungan disebut sebagai *ecological dislocation*, yaitu perpindahan paksa struktur ekonomi, budaya, dan pola hidup masyarakat akibat perubahan drastis pada ruang ekologis. Kehilangan pohon sagu, menurunnya kualitas udara dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menyusutnya sumber daya laut merupakan indikator jelas dari disrupsi ekologis yang kemudian berimplikasi langsung pada disrupsi sosial.

Dalam konteks ini, industri bukan hanya mengubah bentang alam, tetapi juga secara sistematis mengubah strategi nafkah masyarakat. Sebelum kehadiran

perusahaan, struktur ekonomi masyarakat berbasis pada dua pilar utama: perikanan dan perkebunan. Relasi mereka dengan lingkungan bersifat *subsistence*, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan tekanan ekologis.

Masuknya industri pertambangan mengubah pola tersebut menjadi ekonomi upahan yang bergantung pada keberadaan perusahaan. Situasi ini menciptakan *dependency cycle*, di mana masyarakat perlahan kehilangan akses terhadap sumber daya tradisional namun tidak memiliki alternatif lain selain bekerja sebagai buruh.

Pendekatan *political ecology* menjelaskan bahwa perubahan ekologis jarang terjadi secara alami; sebaliknya, ia merupakan hasil dari keputusan politik dan ekonomi yang berpihak pada kepentingan modal. Dalam kasus Kawasi, dominasi industri atas ruang ekologis membuat masyarakat berada pada posisi subordinatif. Ketergantungan pada upah tambang yang cenderung tidak stabil membuat mereka rentan mengalami kerentanan baru, terutama jika perusahaan menghentikan operasi atau mengubah struktur tenaga kerja.

Penolakan sebagian masyarakat terhadap relokasi merupakan bentuk resistensi terhadap disrupsi ekologis tersebut. Mereka tidak sekadar kehilangan ruang fisik, tetapi juga ruang sosial, ruang budaya, serta ruang ekonomi yang selama ini menopang identitas kolektif masyarakat pesisir.

Relokasi dan Keterikatan terhadap Tanah Adat

Relokasi yang dilakukan pemerintah daerah dan perusahaan tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat. Tanah leluhur bukan sekadar aset ekonomi, tetapi simbol identitas, ruang genealogis, dan basis spiritualitas. Dalam masyarakat Kawasi yang memiliki tradisi adat kuat, tanah dan laut bukan hanya sumber ekonomi, melainkan juga bagian dari memori kolektif.

Pemindahan masyarakat sejauh satu kilometer dari laut tidak hanya mengubah jarak fisik, tetapi menghapus seluruh struktur pengetahuan tradisional tentang laut yang diwariskan dari generasi ke generasi. Relokasi tersebut berimplikasi pada hilangnya profesi nelayan, padahal profesi itu merupakan identitas sosial yang telah melekat pada masyarakat selama puluhan tahun. Dalam teori place attachment, masyarakat yang telah lama berinteraksi dengan ruang tertentu memiliki ikatan emosional dan nilai simbolik yang menjadikan tempat tersebut bagian dari eksistensi dirinya. Oleh karena itu, relokasi, betapapun disediakan fasilitas baru, tidak akan mudah diterima karena memutus ikatan identitas tersebut.

Selain itu, kekhawatiran masyarakat terkait kepemilikan tanah di kawasan baru merupakan isu struktural yang penting. Rumah-rumah di *Ecovillage* dibangun di atas tanah milik perusahaan, bukan tanah milik masyarakat. Hal ini menciptakan ketidakpastian jangka panjang karena masyarakat takut akan kemungkinan pengusiran kembali di masa depan. Ketidakpastian ini menegaskan bahwa relokasi tidak memberikan *security of tenure*, yang dalam prinsip perencanaan permukiman merupakan syarat minimum bagi keberlanjutan sosial.

Dalam banyak studi relokasi di Asia Tenggara, relokasi yang tidak memberikan kepastian kepemilikan selalu menimbulkan resistensi sosial dan dianggap sebagai kebijakan yang hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Situasi inilah yang tampak jelas di Kawasi.

Perencanaan Ekonomi di *Ecovillage*

Salah satu kelemahan paling mencolok dalam perencanaan relokasi adalah ketidakmampuan fasilitas ekonomi di *Ecovillage* untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Pasar baru yang dibangun tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi kembali berpusat di pasar lama di Desa Kawasi.

Fenomena ini menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara perencanaan fisik dan pemahaman terhadap

perilaku sosial masyarakat. Dalam teori *people-centered planning*, keberhasilan fasilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh bangunan fisik, tetapi juga oleh:

- a. lokasi yang strategis,
- b. jaringan interaksi ekonomi yang telah terbentuk sebelumnya,
- c. preferensi masyarakat dalam berbelanja,
- d. pola mobilitas,
- e. kepercayaan masyarakat terhadap pusat perdagangan, dan
- f. keberadaan suplai barang yang stabil.

Pembangunan pasar di *Ecovillage* gagal memenuhi aspek-aspek tersebut. Masyarakat lebih memilih pasar lama karena telah menjadi pusat interaksi ekonomi dan sosial puluhan tahun. Relokasi aktivitas ekonomi membutuhkan strategi adaptif jangka panjang, bukan sekadar pembangunan fisik.

Ketidakselesaian pembangunan ruko dan pasar serta tidak digunakannya pasar sementara, mengindikasikan bahwa perencanaan kawasan baru bersifat *top-down* dan terburu-buru, tanpa kajian kelayakan sosial (*social feasibility study*) yang memadai.

Keterlambatan pembangunan jalan tani merupakan persoalan lain yang memperkuat kegagalan perencanaan ekonomi. Padahal, jalan tani tersebut krusial bagi masyarakat yang ingin kembali mengembangkan pertanian sebagai alternatif mata pencaharian. Ketidakhadiran infrastruktur pendukung membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengembalikan kemampuan ekonomi mereka secara mandiri.

Keterbatasan Tata Kelola

Salah satu temuan paling krusial dalam penelitian ini adalah minimnya transparansi proses perencanaan relokasi. Masyarakat mengaku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah atau konsultasi publik secara memadai. Keputusan relokasi dianggap tiba-tiba, bahkan

masyarakat baru mengetahui tujuan pembangunan ketika bangunan fisik telah berdiri.

Situasi ini memperlihatkan kegagalan dalam menerapkan prinsip *good governance*, yaitu:

- a. transparansi,
- b. akuntabilitas,
- c. keterlibatan masyarakat (*participatory governance*), dan
- d. keadilan (*equity*)

Meskipun pemerintah desa mengklaim telah mengadakan tiga kali musyawarah, keterangan ini bertentangan dengan pengalaman masyarakat yang merasa tidak dilibatkan. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya bias representasi, di mana kebijakan hanya melibatkan elit desa dan aktor formal, tetapi mengabaikan masyarakat terdampak yang memiliki hak berbicara atas masa depan ruang hidup mereka.

Ketertutupan informasi juga tampak dari banyaknya pejabat daerah dan pihak perusahaan yang menolak diwawancarai atau saling melempar tanggung jawab. Sikap ini menunjukkan adanya *institutional opacity* yang mengindikasikan:

- a. lemahnya koordinasi antarinstansi,
- b. ketidakjelasan batas kewenangan, dan
- c. potensi konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, relokasi tanpa konsultasi publik yang memadai dapat dianggap sebagai pembatasan hak masyarakat atas ruang dan nafkah. Hal ini menciptakan *distrust* (ketidakpercayaan) terhadap pemerintah maupun perusahaan, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial jangka panjang.

Program CSR

Program CSR melalui Sentra Pertanian Salam Kawasi secara konsep merupakan langkah strategis untuk

mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor tambang. Program ini menawarkan pelatihan pertanian, peternakan, dan perikanan air tawar. Namun, implementasinya tidak sesuai harapan.

Minimnya sosialisasi, kurangnya pendampingan lapangan, serta tidak adanya rencana tindak lanjut membuat program tersebut tidak berfungsi sebagai pusat pemberdayaan, melainkan hanya tempat rekreasi. Kegagalan CSR ini memperlihatkan unsur tokenism dalam pemberdayaan, yaitu program hanya dibuat untuk memenuhi citra perusahaan tanpa memberikan dampak nyata bagi transformasi kehidupan masyarakat.

Dalam teori pembangunan, pemberdayaan harus memenuhi unsur:

- a. peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan
- b. keberlanjutan program
- c. akses terhadap sumber produksi
- d. pendampingan berkelanjutan, dan
- e. hasil ekonomi yang terukur

Kelima unsur tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi dalam program CSR Salam Kawasi. Tanpa perencanaan yang matang dan pendampingan jangka panjang, program pemberdayaan cenderung bersifat temporer dan tidak menyelesaikan akar persoalan ekonomi masyarakat.

Kesenjangan antara Perencanaan dan Realitas

Secara keseluruhan, uraian ini menunjukkan adanya kesenjangan fundamental antara perencanaan relokasi yang diklaim komprehensif dengan kondisi empiris di lapangan. Relokasi Desa Kawasi belum memenuhi prinsip keberlanjutan sosial (*social sustainability*), karena:

- a. tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah dan hunian
- b. tidak mengembalikan peluang ekonomi masyarakat
- c. tidak mempertimbangkan nilai budaya dan ikatan emosional masyarakat terhadap ruang asal
- d. tidak melibatkan masyarakat secara bermakna dalam proses perencanaan

- e. tidak mengembangkan program pemberdayaan secara serius dan berkelanjutan, dan
- f. tidak mampu memfungsikan fasilitas ekonomi yang dibangun

Dalam perspektif administrasi pembangunan, relokasi Kawasi lebih mencerminkan relokasi administratif-fisik, bukan relokasi sosial ekonomi. Akibatnya, masyarakat dipindahkan secara spasial, tetapi tidak diberdayakan secara sosial dan ekonomi.

Relokasi hanya memindahkan persoalan dari satu ruang ke ruang lain tanpa menyelesaikannya. Bahkan, relokasi berpotensi menciptakan masalah sosial baru seperti:

- a. ketergantungan pada upah tambang
- b. hilangnya identitas profesi nelayan
- c. fragmentasi sosial antar warga yang pindah dan tidak pindah
- d. munculnya pengangguran terselubung karena keterbatasan akses ekonomi, dan
- e. potensi konflik horizontal terkait penerimaan atau penolakan relokasi

Uraian ini menunjukkan bahwa relokasi Desa Kawasi merupakan kebijakan yang mengandung beragam persoalan struktural, mulai dari kerusakan ekologis, kerapuhan sosial, perencanaan ekonomi yang tidak matang, lemahnya tata kelola, hingga tidak efektifnya pemberdayaan. Hal ini menegaskan perlunya melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh proses relokasi dan meninjau ulang prinsip-prinsip perencanaan, agar keberlanjutan sosial masyarakat Kawasi benar-benar terwujud, bukan sekadar formalitas pemindahan permukiman.

KESIMPULAN

Analisis mendalam terhadap perencanaan relokasi masyarakat Desa Kawasi menuju *Ecovillage* mengungkapkan kompleksitas dan tantangan signifikan yang jauh melampaui sekadar perpindahan fisik. Menggunakan

kerangka perencanaan transformatif *Friedmann*, studi ini menyimpulkan bahwa proses relokasi ini cenderung bersifat *top-down* dan masih menghadapi berbagai kelemahan fundamental yang menghambat pencapaian tujuan kesejahteraan berkelanjutan. Secara spesifik, ditemukan empat poin krusial: Pertama, perencanaan sosial-ekonomi di *Ecovillage* gagal menginternalisasi kebiasaan dan preferensi masyarakat, yang terlihat jelas dari tidak berfungsinya pasar serta sentra pertanian secara optimal. Ini menunjukkan adanya disonansi antara penyediaan fasilitas dan kebutuhan riil pengguna. Kedua, meskipun program berorientasi masa depan telah dicanangkan, seperti sentra pertanian dan janji kepemilikan lahan, realisasinya masih jauh dari harapan, dengan pembangunan jalan tani yang belum terealisasi dan proses sertifikasi lahan yang lambat. Ketiga, aspek partisipasi masyarakat, yang menjadi inti perencanaan transformatif, sangat minim. Proses pengambilan keputusan cenderung didominasi oleh elit dan kurang melibatkan masyarakat secara aktif dan transparan, menciptakan perasaan keterasingan dan penolakan terhadap relokasi. Musyawarah yang diklaim berlangsung tidak mampu menjembatani kesenjangan persepsi dan kepentingan. Keempat, keseluruhan proses perencanaan ditandai oleh kurangnya transparansi informasi dan koordinasi yang lemah antar berbagai instansi terkait, menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan menghambat akuntabilitas. Kekurangan-kekurangan ini secara kolektif mengindikasikan bahwa relokasi *Ecovillage*, meskipun berpotensi sebagai solusi spasial, belum sepenuhnya menjadi katalisator kesejahteraan. Sebaliknya, pendekatan saat ini berisiko menciptakan persoalan sosial-ekonomi baru dan memperdalam konflik kepentingan. Oleh karena itu, rekomendasi kunci mencakup: (1) peningkatan partisipasi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan sejak awal perencanaan, (2) realisasi konkret program-program penunjang ekonomi dan kepemilikan lahan dengan segera, (3) peningkatan transparansi dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan, dan (4)

penguatan koordinasi antarinstansi dengan menyediakan saluran komunikasi dan pengaduan yang efektif. Pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif adalah esensial untuk memastikan bahwa relokasi Desa Kawasi benar-benar membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

REFERENSI

- CNBC. (2023). *Indonesia punya pabrik nikel terbesar dunia, ini pemiliknya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230604141600-17-442773/indonesia-punya-pabrik-nikel-terbesar-dunia-ini-pemiliknya>
- CNN, I. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 27 Persen, Tertinggi di Dunia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221130141653-532-880860/pertumbuhan-ekonomi-maluku-utara-27-persen-tertinggi-di-dunia>
- Creswell, W. John & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Databooks. (2023). *Deretan Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia pada 2022, Indonesia Nomor Satu!* <https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/aa95dfb4f2f68b5/deretan-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-pada-2022-indonesia-nomor-satu>
- Friedmann, J. (2020). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton University Press.
- Gartika, D., & Diana, M. (2020). JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ECOVILLAGE DI DESA MEKARMUKTI , KABUPATEN BANDUNG BARAT POLICY NETWORK IN THE IMPLEMENTATION OF ECOVILLAGE PROGRAMS IN MEKARMUKTI VILLAGE , BANDUNG BARAT DISTRICT. *Creative Research Journal*, 6(1), 15–28. https://crjournal.jabarprov.go.id/index.php/crj/article/view/222?utm_source=chatgpt.com
- Handayani, S., Priyanto, P., & Gultom, T. (2021). Keanekaragaman Hayati Kawasan Nikel Laterit studi: Pertambangan Nikel Pulau Obi, Maluku Utara. *Prosiding TPT XXX Dan Kongres XI Perhapi 2021*. <https://prosiding.perhapi.or.id/index.php/prosiding/article/view/257/333>
- Kumparan. (2023). *Chairul Tanjung Salip Pemilik Harita Nickel di Daftar Orang Terkaya Forbes*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/chairul-tanjung-salip-pemilik-harita-nickel-di-daftar-orang-terkaya-forbes-20PIDdrbBte>
- Masiha, I. La. (2021). DAMPAK SOSIAL BAGI MASYARAKAT DESA KAWASI KECAMATAN OBI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN ATAS KEHADIRAN PT. HARITA GROUP TAHUN 2009-2018 [Universitas Khoirun]. <https://digilib.unkhair.ac.id/2461/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook (Edition 3)*. SAGE.
- Mongabay. (2023). *Munculkan Banyak Masalah, Nikel Indonesia untuk Siapa?* Mongabay. https://mongabay.co.id/2023/05/30/munculkan-banyak-masalah-nikel-indonesia-untuk-siapa/?utm_source=chatgpt.com
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi pertama)*. CV Harfa Creative.
- Singkawijaya, E. B., Rosali, E. S., As'ari, R., & Wulansari. (2019). PROGRAM ECOVILLAGE SEBAGAI SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN ECOLITERACY SISWA. *Jurnal Metaedukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(1), 25–31. https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/metaedukasi/article/view/978?utm_source=chatgpt.com
- Sutantio, A., Ismawan, G., Karim, M. A. A. G. H., & Hantono, D. (2021). Dampak relokasi terhadap perubahan ruang dan sosial ekonomi masyarakat permukiman kalijodo di jakarta. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 13(1), 9–14. https://tatakota.ub.ac.id/index.php/tatakota/article/view/350?utm_source=chatgpt.com